

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pemulihan/rehabilitasi NTT sebagai salah satu gudang ternak, dengan mengembangkan program diklat berkeahlian dan berwawasan agribisnis dalam rangka mendukung 4 (empat) target utama pembangunan kementerian pertanian. Melalui peranannya Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang handal di bidang peternakan baik aparatur maupun non aparatur.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yaitu: "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kemajuan sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian. Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern."

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja;
- 2) Meningkatkan kompetensi tenaga kepelatihan;
- 3) Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- 4) Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan peternakan dan melaksanakan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK);
- 5) Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan di bidang ternak potong;
- 6) Memberikan pelayanan konsultasi agribisnis;
- 7) Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negeri dan melaksanakan kerjasama luar negeri;
- 8) Melaksanakan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan serta melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel;

- 9) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, penatausahaan dan rumah tangga institusi yang transparan dan akuntabel.

Dalam tataran praktisnya Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

- 1) Menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat pelaku utama usaha pertanian;
- 2) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam menyelenggarakan pelatihan;
- 3) Menumbuh-kembangkan jejaring kerjasama diklat dengan semua pihak yang berkepentingan;
- 4) Menjadi Balai sebagai Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) dan sebagai desiminotor terknologi pertanian bidang peternakan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur berbasis web terintegrasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari 9 Modul pengguna sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Modul-modul tersebut terdiri dari; modul Admin, modul Penganggaran, modul Komitmen, modul Bendahara, modul Pembayaran, modul Persediaan, modul Piutang, modul General Ledger & Pelaporan (GLP), serta modul Aset Tetap.

Laporan Keuangan ini disusun menggunakan data yang diperoleh dari SAKTI menggunakan modul GLP. Data yang terhimpun di dalam modul GLP dan digunakan untuk proses penyusunan Laporan Keuangan merupakan integrasi dari modul penganggaran, bendahara, pembayaran, persediaan dan aset tetap.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPATGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp100 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp2500 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	141,986,000	165,100,000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	73,014,000	84,900,000
Jumlah Pendapatan	215,000,000	250,000,000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	4,095,927,000	3,933,661,000
Belanja Lembur (5122)	50,000,000	52,547,000
Belanja Barang Operasional (5211)	1,292,652,000	1,217,205,000
Belanja Barang Non Operasional (5212)	723,984,000	678,899,000
Belanja Barang Persediaan (5218)	94,460,000	67,142,000
Belanja Jasa (5221)	408,500,000	278,219,000
Belanja Pemeliharaan (5231)	1,129,570,000	1,216,350,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	1,592,800,000	1,660,830,000
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (5261)	90,000,000	60,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,000,000	116,300,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,000,000	0
Jumlah Belanja	9,632,893,000	9,495,958,000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan TA 2022 Semester II mencapai 129,85 % dari target yang ditentukan pada awal tahun anggaran dan mengalami peningkatan sebesar 150% dibandingkan realisasi pendapatan pada periode yang sama di TA 2021. Berikut rincian dan penjelasan PNBPN periode Semester 2 TA 2022:

Rincian Estimasi, Realisasi dan Perbandingan Pendapatan Periode Desember 2021

Uraian	Estimasi	Pendapatan	%	TA 2021
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	165,100,000	99,145,000	60.05	204,154,037
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	28,871,000	-	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	32,399,559	-	
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	84,900,000	94,950,000	111.84	
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	250,000,000	255,365,559	102.15	
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	45,000,000	-	10,900,000
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	24,000,000	-	
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	20,000	-	
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	0	69,020,000	-	
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	250,000	-	450,000
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	250,000	-	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	224	-	
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	224	-	
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	250,000,000	324,635,783	129.85	
JUMLAH PENDAPATAN	250,000,000	324,635,783	129.85	215,504,037

1. Pendapatan dari penjualan hasil pertanian dan peternakan dibawah target yang ditentukan karena pada tahun 2022 terjadi wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) menjelang hari raya Idul Adha yang mengakibatkan penurunan penjualan ternak sapi dan kambing.
2. Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan berupa pelatihan Juru Sembelih Halal yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Juni 2022.
3. Pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya berupa kegiatan magang/praktik kerja lapang untuk siswa dan mahasiswa dari beberapa institusi pendidikan yaitu Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan beberapa SMK Peternakan yang berlokasi di propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai Tusi berupa sewa kelas, sewa asrama, aula dan guest house dari stakeholder lingkup pelatihan.
5. Dapat disimpulkan bahwa intensifikasi kegiatan pelatihan kerja sama dan kegiatan pengembangan SDM berupa magang bagi siswa dan mahasiswa dapat dijadikan sumber PNBPN yang cukup besar bagi BBPP Kupang.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 Semester II adalah sebesar Rp.9,275,735,848 atau 99.98% dari anggaran belanja sebesar Rp.9,281,153,000. Serapan anggaran BBPP Kupang merupakan yang tertinggi diantara seluruh UPT Lingkup BPPSDMP Kementerian Pertanian RI. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3,986,208,000	3,982,050,911	99.99
Belanja Barang	5,178,645,000	5,177,384,937	99.98
Belanja Modal	116,300,000	116,300,000	100
Total Belanja	9,281,153,000	9,279,670,103	99.98

Realisasi Belanja TA 2022 Semester II mengalami penurunan sebesar 60.55% dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Anggaran yang jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2021 menyebabkan berkurangnya intensitas kegiatan pelatihan di Tahun Anggaran 2022 sehingga menyebabkan nilai belanja barang turun drastis dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2021.
2. Belanja Pegawai tidak berbeda jauh dengan TA sebelumnya karena tidak ada perubahan yang signifikan terkait jumlah dan komposisi PNS di BBPP Kupang. Tahun Anggaran 2022 terdapat 3 pegawai keluar (2 Pensiun, 1 Mutasi Keluar) dan 3 pegawai masuk (2 CPNS dan 1 Mutasi Masuk).
3. Belanja modal berkurang cukup besar karena diarahkan dikurangi agar bisa memaksimalkan belanja barang untuk mengoptimalkan kegiatan pelatihan meskipun dengan komposisi anggaran yang kurang ideal (belanja pegawai mencapai 42.9% dari jumlah anggaran yang disetujui).

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	%
Belanja Pegawai	3,982,050,911	3,958,278,516	100.71
Belanja Barang	5,177,384,937	10,861,781,606	47.68
Belanja Modal	116,300,000	507,500,000	22.92
Total Belanja	9,275,735,848	15,327,560,122	60.55

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3,985,985,166 dan Rp.3,958,278,516. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai sampai dengan Semester II TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,6% dibandingkan semester II TA 2021. Pengembalian belanja terjadi karena ada PNS yang terlambat menyelesaikan admisinstrasi kematian keluarha (istri) sehingga masih menerima tunjangan keluarga. Pengembalian dilakukan setelah penghentian tunjangan istri berlaku dan besaran pengembalian sesuai dengan nominal kelebihan peembayaran.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,933,438,166	3,885,130,017	1.24
Belanja Lembur	52,547,000	74,259,000	-29.24
Jumlah Belanja Kotor	3,985,985,166	3,959,389,017	0.67
Pengembalian Belanja Pegawai	-3,934,225	-1,110,501	254.27
Jumlah Belanja	3,982,050,911	3,958,278,516	0.60

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,177,384,937 dan Rp. 10,861,781,606. Nilai realisasi belanja barang Semester II TA 2022 mengalami penurunan sebesar 52.33% dari Semester II TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan alokasi anggaran yang sangat signifikan dibanding TA 2021 yaitu sebesar 40,2%
2. Penurunan alokasi anggaran berdampak pada berkurangnya kegiatan pelatihan sehingga belanja barang non operasional seperti ATK, atribut pelatihan dan kebutuhan diklat lainnya menjadi lebih sedikit dibandingkan TA 2021.
3. Berkurangnya kegiatan pelatihan offline mengakibatkan belanja perjalanan dinas dalam negeri turun sebesar 66.73% dibanding tahun lalu karena berdampak terhadap jumlah perjalanan peserta, panitia, narasumber dan praktisi.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	%
Belanja Barang Operasional	1,217,184,045	1,246,177,250	-2.33
Belanja Barang Non Operasional	678,544,261	2,378,601,300	-71.47
Belanja Barang Persediaan	67,132,909	176,110,085	-61.88
Belanja Jasa	277,458,820	717,110,973	-61.31
Belanja Pemeliharaan	1,216,328,633	1,202,406,289	1.16
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,660,736,269	4,991,384,800	-66.73
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	60,000,000	149,990,909	-60.0
Jumlah	5,177,384,937	10,861,781,606	-52.33

Untuk Nilai realisasi belanja barang persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan nilai dengan aplikasi monsakti yang menyebutkan nilai pembelian persediaan sebesar Rp.67,084,909 sehingga terjadi selisih nilai sebesar Rp.48,000. Selisih nilai tersebut disebabkan karena kesalahan input pada persediaan lainnya berupa obat hewan yang seharusnya masuk ke persediaan konsumsi.

B.5. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp.116,300,000 sedangkan pada periode yang sama di TA 2021 sebesar Rp.507,500,000.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116,300,000	7,500,000	1,450.67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	500,000,000	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	116,300,000	507,500,000	-77.08
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	116,300,000	507,500,000	-77.08

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp.116,300,000. Peningkatan realisasi belanja modal periode Semester II TA 2022 dibandingkan TA 2021 karena alokasi belanja modal hanya dialokasikan untuk peralatan dan mesin, tidak diarahkan untuk perbaikan gedung dan bangunan maupun perbaikan jalan. Nilai belanja modal dihasilkan dari :

1. Pembelian 2 Unit mesin Chopper senilai Rp.30,000,000
2. Pembelian Pompa Air senilai Rp.3,000,000
3. Pembelian 1 Unit AC senilai Rp.9,500,000
4. Pembelian alat srumah tangga lainnya senilai Rp.3,250,000
5. Pembelian 4 unit alat Laboratorium senilai Rp.42,500,000
6. Pembelian 6 unit personal komputer senilai Rp.24,500,000

Detail spesifikasi barang dan kelengkapan dokumen pembelian dapat dilihat di Laporan Barang Milik Negara Periode Semester II TA 2022.

Tambahan : Pada menu To Do List di Monsakti terdapat notifikasi ketidaksesuaian kode akun vs kode barang, hal ini terjadi karena kesalahan penginputan barang belanja modal berupa 4 unit microphone senilai Rp.3,800,000. Berdasarkan harga satuan microphone, barang tersebut tidak termasuk kategori barang belanja modal karena nilai satuannya dibawah Rp.1,000,000.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116,300,000	7,500,000	1,450.67
Jumlah Belanja Kotor	116,300,000	0	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	116,300,000	7,500,000	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.33,904,500 dan Rp42,301,250. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	12,944,396	42,301,250
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	12,944,396	42,301,250

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp37,098,259,000 dan Rp37,098,259,000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13,520,820,148 dan Rp12,861,443,760. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	12,861,443,760
Mutasi Tambah	
Pembelian	112,500,000
Transfer Masuk	900,000,000
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	353,123,612
Saldo per 31 Desember 2022	13,520,820,148
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-11,992,257,674
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1,528,562,474

Nilai Mutasi Tambah berasal dari pembelian Alsintan, Peralatan Laboratorium dan Personal Komputer (nilai terlampir). Transfer masuk senilai Rp.900,000,000 berupa videotron dari Kementerian Pertanian.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.21,675,048,715 dan Rp.21,676,913,715. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	21,676,913,715
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	338,072,000
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-1,865,000
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2022	22,013,120,715
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-4,486,500,597
Nilai Buku per 31 Desember 2022	17,526,620,118

Mutasi transaksi kurang sebesar Rp.1,865,000 berupa penghentian penggunaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat dikarenakan kondisi rusak berat (kode barang 4.01.01.303 NUP 2)

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp2,793,976,100.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp25,000,000 dan Rp25,000,000.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.17,837,356,924. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
----	------------	-----------------	-----------------	------------

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13,520,820,148	-11,992,257,674	1,528,562,474
2.	Gedung dan Bangunan	22,013,120,715	-4,486,500,597	17,526,620,118
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,793,976,100	-1,358,598,653	1,435,377,447
Jumlah		38,327,916,963	-17,837,356,924	20,490,560,039

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp20,615,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Dimana aset tersebut berupa software komputer dan akan dilakukan penghapusan, karena aset tersebut berasal dari Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal dan tidak dimanfaatkan.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	0
Jumlah	0

Nilai saldo awal Aset tak berwujud pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.20,615,000 berupa software dan telah direkalsifikasi ke aset lain-lain.

C.4.2 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp277,970,306 dan Rp403,950,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	146,407,000
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain	354,988,612
Reklasifikasi Dari Aset tak berwujud ke Aset Lain-lain	20,615,000

Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0
Saldo per 31 Desember 2022	375,603,612
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-374,618,330
Nilai Buku per 31 Desember 2022	985,282

Mutasi transaksi penambahan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Mutasi penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berupa kendaraan bermotor (minibus penumpang 14 orang kebawah) yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan senilai Rp. 125,000,000
2. Mutasi penambahan dari reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya Alsintan berupa traktor four wheel merek Iseki senilai Rp. 200,000
3. Mutasi penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain berupa personal komputer senilai Rp.223,425,306
4. Mutasi penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berupa peralatan personal komputer (Printer) sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp.4,498,306
5. Mutasi penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya 1 (satu) unit Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat senilai Rp.1,865,000
6. Mutasi penambahan dari reklasifikasi aset tak berwujud ke aset lai-lain berupa software senilai Rp.20,615,000.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-374,618,330 dan Rp-54,401,226..

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
----	--------------	-----------------	-----------------	------------

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	20,615,000	-20,615,000	0
2.	Aset Lain-lain	375,603,612	-374,618,330	985,282
Jumlah		396,218,612	395,233,330	985,282

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.48,922,842. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	13,349,000	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	35,349,000	28,797,154
Jumlah	48,922,842	28,797,154

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar berupa Uang Makan PNS bulan Desember 2022 yang dibayarkan di bulan Januari 2023.
2. Belanja Barang yang masih harus dibayar berupa:
 - a. Tagihan Listrik (telepon) senilai Rp. 1,152,407
 - b. Tagihan internet senilai Rp. 9,992,220
 - c. Biaya Langganan Zoom senilai Rp.1,855,163
 - d. Tagihan Listrik senilai Rp.22,574,052

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.57,578,825,875 dan Rp.57,954,078,075. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp295,764,559 dan Rp187,609,037 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	250,000	450,000	-44.44
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	20,000	1,600,000	-98.75
Pendapatan Pendidikan Lainnya	45,000,000	7,500,000	500
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	24,000,000	1,800,000	1233.33
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	94,950,000	6,000,000	1482.50
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	99,145,000	111,137,340	-10.79
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	32,399,559	59,121,697	-45.20
Jumlah	295,764,559	187,609,037	57.65

1. Pendapatan layanan penelitian/riset dan pengembangan dan pengembangan Iptek sebesar Rp.20,000,- merupakan penjualan buah sukun sebanyak 2 kg. Hal ini merupakan kekeliruan bendahara penerima dalam memilih akun setoran ketika proses penyetoran PNPB.
2. Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan berupa pelatihan Juru Sembelih Halal yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Juni 2022.
3. Pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya berupa kegiatan magang/praktik kerja lapang untuk siswa dan mahasiswa dari beberapa institusi pendidikan yaitu Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
4. Pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai Tusi berupa sewa kelas, sewa asrama, aula dan guest house dari stakeholder lingkup pelatihan.
5. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya yaitu berupa hasil penjualan hasil-hasil pertanian dan peternakan mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada TA 2021.

6. Terdapat selisih pencatatan nilai PNPB antara Laporan Operasional dengan LRA senilai Rp.28,871,224 yaitu berupa penerimaan atas lelang kendaraan operasional roda 4 senilai Rp.28,871,000 dan penerimaan kembali belanja pegawai dari tahun anggaran yang lalu senilai Rp.224.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3,995,399,911 dan Rp.3,953,991,002, naik sebesar 1,05%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,650,569,460	2,691,102,400	-1.51
Beban Pembulatan Gaji PNS	40,426	38,886	3.96
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-3,932,800	0	100
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	198,087,950	208,479,930	-4.98
Beban Tunj. Anak PNS	59,748,590	59,431,340	0.53
Beban Tunj. Struktural PNS	42,070,000	52,670,000	-20.13
Beban Tunj. Fungsional PNS	336,345,000	237,570,000	41.14
Beban Tunj. PPh PNS	13,112,940	9,037,387	45.10
Beban Tunj. Beras PNS	154,978,800	159,251,580	-2.68
Beban Uang Makan PNS	422,779,000	386,146,000	9.49
Beban Tunjangan Umum PNS	69,055,000	76,005,000	-9.58
Beban Uang Lembur	52,547,000	74,259,000	-29.24
Jumlah	3,995,339,911	3,953,991,022	1.05

1. Beban tunjangan fungsional PNS mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh adanya penyetaraan jabatan dari eslon III dan eslon IV ke jabatan fungsional, sehingga tunjangan fungsional tahun berjalan lebih besar dari tahun anggaran yang lalu, hal ini juga menyebabkan berkurangnya beban Tunjangan struktural lebih kecil dibanding tahun anggaran yang lalu;

2. Beban uang lembur mengalami penurunan dikarenakan instensitas kegiatan pelatihan yang rendah sehingga pegawai yang harus bekerja diluar jam kantor juga ikut menurun.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.75,102,913 dan Rp.160,251,685. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	71,639,013	147,106,500	-51.3
Beban persediaan lainnya	3,463,900	13,145,185	-73.65
Jumlah	75,102,913	160,251,685	-53.13

1. Beban persediaan konsumsi berupa ATK dan bahan pakan ternak berupa polar, beban persediaan lebih sedikit dibanding tahun lalu karena penurunan anggaran yang dialokasikan untuk BBPP Kupang sehingga butuh penyesuaian dan penghematan.
2. Beban persediaan lainnya berupa obat-obatan ternak, pembelian pada periode ini lebih besar dibanding dengan tahun yang lalu dikarenakan jumlah permintaan dan pemakaian disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

Adapun rincian belanja persediaan dan beban persediaan sebagai berikut:

MAK.521811, 523123, 593113	Nilai
Belanja persediaan konsumsi	67,123,909
Belanja persediaan Pemeliharaan	3,593,405
Total Belanja Persediaan	70,717,314
Beban Persediaan Konsumsi	71,693,013
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan	3,463,900
Beban Persediaan Lainnya	0
Total Beban Konsumsi-LO	75,102,913
Saldo Awal Persediaan	46,864,400
Saldo Akhir Persediaan	12,944,396

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4,343,753,667 dan Rp2,725,435,223. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,039,201,020	993,099,200	4.64
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,486,150	9,993,050	-25.09
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	126,224,000	182,960,000	-31.01
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44,362,895	94,625,000	-53.12
Beban Bahan	643,319,624	965,363,200	-33.36
Beban Honor Output Kegiatan	5,400,000	7,240,000	-25.41
Beban Barang Non Operasional Lainnya	31,679,800	26,625,300	18.98
Beban Langganan Listrik	265,283,825	222,059,217	19.47
Beban Jasa Profesi	11,450,000	97,800,000	-88.29
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,556,500	399,115,900	-98.61
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,800,000	0	0.00
Jumlah	2,183,763,814	4,343,753,667	-49.73

Beban barang dan Jasa periode semester 2 TA 2022 mengalami penurunan sebesar 47,53% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Penurunan tersebut dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah mulai terkendali sehingga anggaran untuk penanganan Covid-19 pun sudah jauh berkurang.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.426,248,590 dan Rp.204,848,200. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	785,859,700	731,321,920	7.5
Beban Pemeliharaan Jaringan	21,991,000	21,193,900	3.8
Beban Pemeliharaan Lainnya	113,133,300	78,997,000	43.2
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291,751,228	321,943,469	-9.4
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	29,543,405	26,750,000	10.4
Jumlah	1,242,278,633	1,180,206,289	5.3

Sesuai dengan tabel diatas menjelaskan bahwa beban pemeliharaan mengalami kenaikan dibanding dengan tahun anggaran lalu yaitu sebesar 5,3%. Kenaikan yang signifikan terdapat pada beban pemeliharaan lainnya sebesar 43,2%. Peningkatan ini disebabkan karena penambahan populasi ternak yang terus meningkat sehingga kebutuhan bahan pakan ternak juga ikut meningkat. Selain itu optimalisasi lahan praktek menjadi instalasi smart farming juga menyebabkan beban pemeliharaan lainnya meningkat.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1,002,838,830 dan Rp.3,085,880,600. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	651,565,161	532,472,800	22.37
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,574,348,900	-100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	652,921,878	491,995,700	32.71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	356,249,230	392,567,400	-9.25
Jumlah	1,002,838,830	4,991,384,800	-79.91

Untuk periode anggaran 2022, BBPP Kupang tidak menerima anggaran perjalanan dinas penganan Covid-19 dikarenakan kondisi wabah yang telah tertangani dengan baik. Kegiatan Perjalanan Dinas Paket meeting Luar kota juga banyak berkurang karena banyak kegiatan yang dilakukan secara daring.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp60,000,000 dan Rp149,990,909. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	60,000,000	149,990,909	-60
Jumlah	60,000,000	149,990,909	-60

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode ini terdapat beban barang yang diserahkan ke masyarakat yaitu berupa sarana dan prasana yang diserahkan ke 2 (dua) P4S binaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) lingkup satker Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Nama P4S	Alamat	Nominal	Nama Barang
Kampung daun Ad Mahow	Desa Baumata Kec. Taibenu Kab. Kupang Prov. NTT	Rp.30,000,000,-	1. Laptop 2. Printer 3. Projector LCD Epson 4. Layar Projector 5. Laser Pointer 6. Mouse Wireless 7. Lemari Arsip 8. Kursi Tangan 9. Meja ½ biro 10. Dinamo Pengisap air 11. Papan White Board 12. Meja Narasumber
P4S Afro Farm	Desa Baumata Timur Kec. Taibenu, Kab. Kupang Prov. NTT	Rp.30,000,000,-	1. Mesin Tetas Telur 2. LCD 3. Layar Projektor 4. Laptop

			5. Printer
			6. Kursi

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 732.019729,00 dan Rp720.376.804,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	726,407,523	771,117,944	-5.8
Beban Penyusutan Irigasi	79,500,190	79,500,190	0.0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	92,469,844	92,469,842	0.0
Beban Penyusutan Jaringan	4	4	0.0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3,824,404	12,405,780	-69.2
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	623,169,543	585,788,968	6.4
Jumlah	1,525,371,508	1,541,282,728	-1.0

Sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebanyak 1%. Penurunan terbesar ada pada transaksi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, hal ini dikarenakan aset yang sudah tidak digunakan sudah di reklasifikasi menjadi aset lainnya untuk selanjutnya dilakukan penghapusan.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	224	0	100
Jumlah	224	0	100

Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa beban kerugian pelepasan aset berupa beban pelepasan aset non lancar dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa hasil pelelangan microbus (penumpang 15 s.d 29 orang) NUP 1.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp57,954,087,075 dan Rp58,731,286,344

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp-10,418,017,265 dan Rp-16,234,004,364 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-196,534,456.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-263,095,947. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp459,630,403. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10,042,765,065 dan Rp15,260,261,639. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	9,275,735,848
Diterima dari Entitas Lain	-342,635,783
Transfer Masuk	1,091,665,000
Jumlah	10,042,765,065

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp-342,635,783 sedangkan DKEL sebesar Rp9,275,735,848

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp57,578,825,875 dan Rp57,954,078,075

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

DIPA BBPP Kupang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan pada tanggal 17 Nopember 2021 senilai Rp.9,632,893,000. Sampai dengan 31 Desember 2022, BBPP Kupang melakukan 6 (enam) kali pergeseran anggaran dalam satu program dan tidak menyebabkan pengurangan volume output yaitu pada tanggal 9 Maret, 13 April, 18 Mei, 3 Juni, 6 Juli, dan 14 Juli. Kegiatan Refocusing anggaran dilakukan pada revisi ke 7 (tujuh) tanggal 2 September yang menyebabkan perubahan nilai Pagu Anggaran menjadi Rp.9,495,958,000. Revisi 8 (delapan) pada tanggal 10 Oktober 2022 tidak mengubah nilai pagu. Refocusing kedua dilakukan pada Revisi 9 (sembilan) tanggal 20 Oktober 2022 dan mengubah nilai pagu anggaran menjadi Rp.9,473,174,000. Revisi 10 (sepuluh) melakukan update halaman III Dipa pada tanggal 28 Oktober 2022. Refocusing ketiga dilakukan pada Revisi ke 11 (sebelas) di tanggal 30 Nopember dan mengubah nilai pagu menjadi Rp.9,281,153,000. Revisi ke 12 (dua belas) pada tanggal 6 Desember 2022 melakukan pergeseran rincian anggaran dan tidak mengubah nilai pagu.

Secara keseluruhan, BBPP Kupang melakukan 12 (dua belas) kali Revisi Dipa dan mengalami 3 kali pengurangan nilai Pagu yang semula Rp.9,632,893,000 menjadi Rp.9,281,153,000 karena kebijakan Refocusing dari BPPSDMP.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 838/Kpts/KU.010/12/2018, Tgl. 03 Desember 2018 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, dan Surat Keputusan Kepala Balai/KPA Nomor : 29/Kpts/KU.010/I.18/01/202 Tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai/KPA Nomor : 03/Kpts/KU.010/I.18/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022.

Adapun susunan Pejabat Pengelola Keuangan adalah sbb;

Kuasa Pengguna Anggaran	: drh. Bambang Haryanto,MM
Pejabat Pembuat Komitmen	: H. Muhammad Ukkas,S.Pi. M.Si.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Rukmawati, S.ST,MM
Bendahara Pengeluaran	: Endang Oktavia Giri, SE
Bendahara Penerima	: Ester Yohalinda Oematan